

# Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Oleh:

Lailatul Mufidah (192020100012)

Dosen Pembimbing : Lailul Mursyidah, M.AP

**PRODI ADMINISTRASI PUBLIK**  
**FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

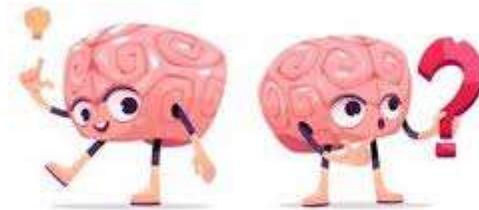
# PENDAHULUAN

Desa telah mengalami perubahan paradigma sejak tahun 2015 ketika kebijakan membangun desa yang memiliki nilai mandiri baik secara politik maupun ekonomi yang berbasis kearifan lokal, sosial, dan budaya yang kuat. Pemerintah Desa (Pendes) merupakan badan administrasi negara yang terdesentralisasi dan berperan penting dalam pengaturan masyarakat desa serta menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pembangunan nasional (Rafsanzani, 2013). Untuk dapat menyelenggarakan, mengelola dan melaksanakan pembangunan di desa dengan kemampuannya sendiri, desa memerlukan pendapatan sendiri yang disebut sebagai pendapatan awal yang berasal dari desa. Pendapatan awal yang berasal dari desa atau Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dijelaskan dalam Undang-Undang Desa Nomor. 6 Tahun 2014 pada Pasal 72(1) ayat 1 ayat a, “Pendapatan asli desa adalah pendapatan pemerintah desa berdasarkan hak asal usul dan tingkat desa setempat. Hasil usaha yang dimaksudkan adalah hasil BUMDESA dan tanah aset desa atau tanah bengkok.”



# PENDAHULUAN

Dalam Permendes No. 4 Tahun 2015 menjelaskan tentang Pendirian, Pengurusan, Penatausahaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam Pasal 19 dijelaskan ada beberapa jenis atau macam-macam usaha yang bisa dipergunakan sebagai usaha untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas bidang usaha, diantaranya Bisnis dibidang Sosial, Bisnis dibidang Penyewaan, Usaha Perantara, Bisnis Produksi/Perdagangan, Bisnis Keuangan dan Usaha Bersama. Dalam pendiriannya di Kabupaten Sidoarjo, BUMDes berlandaskan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor. 4 tahun 2009 tentang prosedur Pembentukan serta pengelolaan BUMDes yang sekarang digantikan oleh PERDA Nomor. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan serta Pengelolaan BUMDes.



Kemudian dalam Peraturan Desa Karangtanjung Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 04 Agustus 2021. BUMDes Tanjung Mekar mempunyai beberapa jenis usaha yang dikembangkan, terbagi menjadi 4 Bagian yaitu : Unit Jasa Dan Pembayaran Online, Unit Perdagangan, Unit Pasar Dan Pujasera, Dan Unit Pengelolaan Sampah. Dengan ditetapkannya Kebijakan BUMDes memberikan dorongan kepada semua PEMDA (Pemerintah Daerah) untuk berjalan maju bersama dalam penerapannya, Salahsatunya yakni Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Sidoarjo.

# Jumlah PAD Desa Karangtanjung Sebelum dan Sesudah Adanya BUMDes

## Jumlah PAD Desa Karangtanjung Sebelum dan Sesudah Adanya BUMDes

No	Tahun	Jumlah PAD Desa Karangtanjung
1	2020	87.000.000,00
2	2021	117.000.000,00
3	2022	124.915.000,00

Sumber : Kantor Pemerintah Desa Karangtanjung (2023)

# Mengapa BUMDes Desa Karangtanjung???

Dalam tahap perencanaan, terlaksananya program-program yang ada belum sepenuhnya berjalan dengan baik contohnya dalam bidang unit perdagangan, unit pasar dan pujasera serta unit pengelolaan sampah.

1



2

Dalam tahap pelaksanaan pengelola, kurangnya kinerja anggota dalam struktur organisasi membuat fungsi dan tugas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berjalan tidak efektif. Juga kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) cukup rendah

3

pada tahap pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan usaha, keterlibatan anggota pengawas dalam mengawasi kinerja pengurus belum maksimal atau secara bertahap sehingga mengakibatkan kinerja pengurus kurang baik

# PENELITIAN TERDAHULU

Jeli Koso, Dkk.  
(2018)

“Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa”

Hasil dari penelitian ini yaitu Manajemen Pengelolaan BUMDes yang ada di Desa Watulaney Amian, Kec. Lembean Timur, Kab. Minahasa masih belum dilaksanakan dengan baik. Dilihat dari tahap perencanaannya masih belum terlaksananya program yang sudah ditetapkan didalam perencanaan juga dilihat dari pelaksanaan pengelolaan yang belum terlihat maksimal karena pengorganisasian kepengurusan yang dinilai kurang menjadi salahsatu penyebab beum terlaksananya pengelolaan yang sempurna.

Filya, A.R. (2018)

Optimalisasi Pengelolaan BUMDES dalam Meningkatkan PADES di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur {Studi Kasus : di Desa Sukorejo Kec. Bojonegoro)

Beberapa indikator belum sepenuhnya terpenuhi yaitu modal, ketenagakerjaan, konsumen atau pangsa pasar, pengelola yang bertanggungjawab dan peningkatan laba dan rugi membuat pengelolaan BUMDes berjalan baik namun belum optimal.

Hardilina. P, dkk  
(2022)

Penguatan Manajemen BUMDes Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya

Terbatasnya kemampuan pengurus BUMDes dalam menentukan jenis usaha yang dijadikan sebagai bisnis BUMDes, masih terbatasnya kemampuan pengurus BUMDes dalam memperluas pasar, khususnya dalam menjalin kerjasama dengan pihak swasta (pemasok, distributor, dan lain-lain serta masih lemahnya pengurus BUMDes dalam melakukan promosi bagi usaha BUMDes).

# METODE PENELITIAN

Metode Penelitian :  
Deskriptif Kualitatif



Teknik  
Pengumpulan Data :  
1. Wawancara  
2. Dokumentasi  
3. Sumber data

Teknik Analisis Data :  
Analisis Interaktif dari  
Miles & Huberman (1992;  
16) dengan menggunakan  
cara pengumpulan data,  
reduksi data, penyajian  
data dan kesimpulan.

Jenis Penelitian :  
Deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-  
masalah yang terdapat pada Badan Usaha Milik  
Desa Karangtanjung

Lokasi Penelitian:  
Desa Karangtanjung lebih  
tepatnya di BUMDes (Badan  
Usaha Milik Desa) Tanjung  
Mekar Desa Karangtanjung.

Teknik Penentuan Informan:  
Pemilihan informan ditentukan  
oleh peneliti berdasarkan pada  
pengaruh dan struktur  
kepengurusan di BUMDes  
Karangtanjung .  
( Teknik Purposive Sampling)

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TANJUNG MEKAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA KARANGTANJUNG

### Planning atau Perencanaan

Perencanaan adalah pemilihan dan integrasi fakta untuk mengkonfirmasi asumsi tentang masa depan, menciptakan gambaran visual, dan merumuskan tindakan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

01

#### VISI

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Karangtanjung melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dengan semboyan “BERSAMA MEMBANGUN DESA”.

02

#### MISI

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Memperkuat kewirausahaan masyarakat dalam mengelola potensi perekonomian desa;
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan awal desa;
4. Mengelola dana program kepada Desa dalam bentuk dana bergulir, khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan.

03

#### TUJUAN

mampu memberikan kenyamanan dan bantuan kepada masyarakat Desa Karangtanjung dengan memberikan sedikit keuntungan sosial kepada mereka lewat usaha- usaha yang dibentuk meskipun keuntungan yang diperoleh tidak begitu besar apalagi untuk meningkatkan perekonomian yang ada di desa.

# Planning atau Perencanaan

01

## JANGKA PANJANG

1. Bekerjasama dengan perusahaan lain atau membentuk badan usaha yang secara langsung berada dibawah BUMDes, untuk melakukan perdagangan barang dan jasa ke Instansi / Perusahaan yang berada diluar wilayah Desa Karangtanjung bahkan diluar kabupaten Sidoarjo;
2. Membentuk bank desa atau sejenisnya;
3. Membangun Fasilitas Penggilingan Padi.

02

## JANGKA MENENGAH

1. Membuka agen distribusi dan perdagangan LPG (subsidi maupun non subsidi);
2. Membuka agen distribusi dan perdagangan sembako seperti gula, minyak dan beras;
3. Pengelolaan Gedung Serbaguna milik Desa.

03

## JANGKA PENDEK

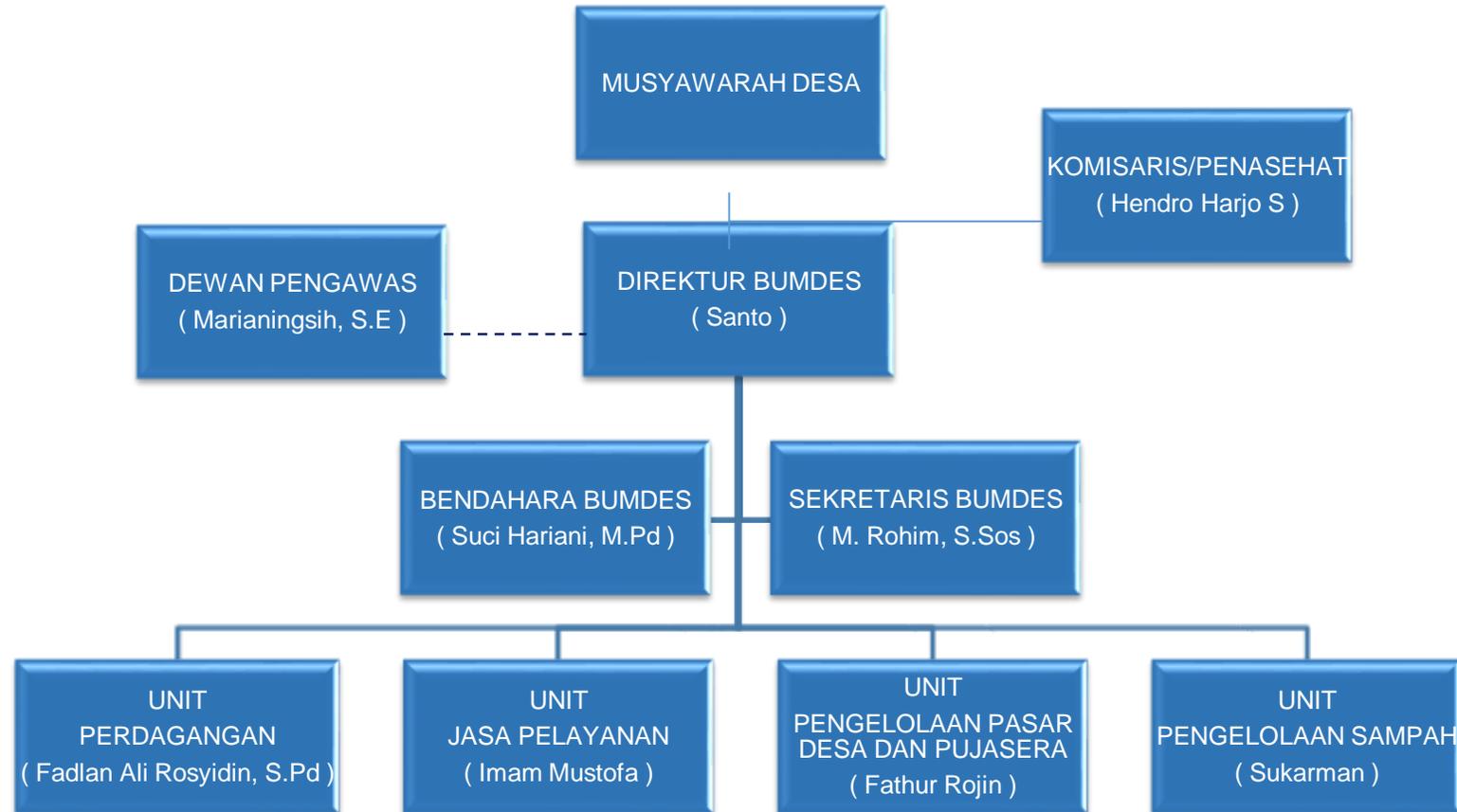
1. Membuka usaha jasa pembayaran online (PPOB) seperti listrik, telepon, pulsa, internet, dll;
2. Pengelolaan sampah;
3. Pengelolaan Pasar Desa dan Pujasera Desa.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## Organization atau Pengorganisasian

Pengorganisasian biasa diartikan juga sebagai proses umum pengelompokan kelompok, peralatan, pekerjaan, tanggungjawab dan kewewenangan untuk membentuk suatu organisasi yang dapat dimobilisasi sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu

**STRUKTUR  
ORGANISASI BADAN  
USAHA MILIK DESA  
“ TANJUNG MEKAR “**



Sumber : Kantor Pemerintah Desa Karangtanjung (2023)

# Organization atau Pengorganisasian

Mengingat struktur organisasi di atas, hak, kewajiban dan larangan unit usaha Desa Tanjung Mekar dan Desa Karangtanjung, termasuk hasil musyawarah desa dengan partisipasi kepala desa dan perangkat, BPD dan anggota lainnya, RT dan RW, Masyarakat pimpinan, tokoh agama, dan pengurus serta anggota BUMDes. Kemudian Hasil Musyawarah Desa di setujui oleh Kepala Desa, di teruskan oleh Direktur BUMDes untuk disampaikan kepada para anggotanya sesuai dengan posisinya masing-masing lalu Kinerja Direktur Badan Usaha Milik Desa dan anggotanya diawasi langsung oleh pengawas BUMDes. Pengawas melakukan tugasnya untuk memantau apakah kinerja Direktur BUMDes dan anggotanya sudah dilaksanakan sesuai dengan instruksi dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa atau belum.



Perbandingan antara pengorganisasian di BUMD Tanjung Mekar Karangtanjung dengan pengorganisasian di BUMD di Desa Kamang Kecamatan Tompaso yang merupakan penelitian Mario W,dkk menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa di Desa Kamang Kecamatan Tompaso berjalan dengan cukup baik namun masih jauh dari kata maksimal dikarenakan di Desa tersebut belum melakukan pelatihan apapun untuk kemajuan BUMDes. Sedangkan di BUMDes Tanjung Mekar sudah beberapa kali melakukan Studi tiru dan pelatihan-pelatihan lainnya, Misal Pelatihan Ecoprint.

Sumber : Kantor Pemerintah Desa Karangtanjung (2023)

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TANJUNG MEKAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA KARANGTANJUNG

### Actuating atau Pelaksanaan

Pelaksanaan atau aktivasi (Actuating) adalah tindakan yang bertujuan sebagai alat untuk memastikan bahwa seluruh anggota berusaha mencapai tujuan sesuai dengan rencana dan upaya organisasi, yang berarti mempersiapkan orang untuk bekerja mandiri guna mencapai tujuan secara efektif.

Direktur BUMDes Tanjung Mekar Melakukan strategi pemasaran jemput bola. Artinya, pihak BUMDes dalam hal ini karyawan BUMDes yang dipilih untuk menjalankan usaha jasa pelayanan pembayaran online ini mengunjungi rumah-rumah warga desa, sekaligus menawarkan layanan pembayaran tagihan. Oleh karena itu, petugas BUMDES mengambil sedikit uang pembayaran dari warga desa sebulan sekali.

Selain itu, pihak BUMDes juga bisa bekerja sama dengan Pemerintah Desa untuk memasarkan produk usaha jasa layanan ini kepada masyarakat desa, melalui :

1. Penerbitan Surat Edaran dan Himbauan kepada warga desa melalui RT/RW;
2. Mengumumkan melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Desa, dll.

# Actuating atau Pelaksanaan

## UNIT JASA DAN PEMBAYARAN ONLINE

Beberapa jasa yang ditawarkan di Unit ini diantaranya yaitu Menerima pembayaran listrik, pembayaran PBB, pembayaran PDAM, pembayaran e-wallet seperti OVO, Dana, Gopay, dan lain-lain serta melayani pembayaran transfer ke berbagai Bank serta sudah memiliki izin bekerjasama dengan Bank JATIM



Sumber : Kantor Pemerintah Desa Karangtanjung (2023)

## UNIT PENGELOLAAN SAMPAH

Cara kerja unit ini yaitu dengan mengumpulkan dan mengangkut sampah yang ada di rumah warga kemudian dibawa ke tempat sampah untuk dilakukan pembakaran. Setiap bulannya warga yang mengikuti program ini satu rumah dikenakan biaya sekitar dua puluh ribu rupiah setiap bulannya

## UNIT PERDAGANGAN Serta UNIT PASAR DAN PUJASERA

menyediakan tempat untuk disewakan kepada masyarakat yang ingin memiliki tempat untuk menawarkan dagangannya. Bangunan yang dimiliki BUMDes menyediakan fasilitas bagi Masyarakat seperti kamar mandi umum dan aliran listrik. Terdapat 12 Bangunan pujasera yang tersedia, namun hanya 2 bangunan yang ditempati sehingga pada unit ini pengelolaan dan pemanfaatan Gedung belum berjalan secara maksimal.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TANJUNG MEKAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA KARANGTANJUNG

### Controlling atau Pengawasan



Sumber : Kantor Pemerintah Desa Karangtanjung (2023)

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan, mengevaluasinya dan bila perlu memperbaikinya agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana awal.

Pertemuan Badan Usaha Milik Desa Tanjung Mekar dilaksanakan setiap dua bulan sekali di Desa Karangtanjung untuk meninjau perkembangan usaha Badan Usaha Milik Desa Tanjung Mekar. Pertemuan ini mempertemukan jajaran direksi perusahaan milik Desa Tanjung Mekar serta perangkat Desa Karangtanjung.

# Jumlah PAD Desa Karangtanjung Sebelum dan Sesudah Adanya BUMDes Dari Tahun 2020 hingga 2023

Keterangan	No	Tahun	Jumlah PAD Desa Karangtanjung
sebelum	1	2020	87.000.000,00
sesudah	2	2021	117.000.000,00
sesudah	3	2022	124.915.000,00
sesudah	4	2023	122.877.252,00

Sumber : Kantor Pemerintah Desa Karangtanjung (2023)

# KESIMPULAN

Berdasarkan pada penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjung Mekar di Desa Karangtanjung pengelolaannya sudah berjalan dengan cukup baik karena dapat meningkatkan PAD Desa mulai dari awal di bentuk hingga saat ini. Beberapa kendala yang di temui : a. Planning atau Perencanaan, sudah cukup baik karena pengkajian sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Pemerintah Desa Karangtanjung terkait bagaimana proses pendirian Badan Usaha Milik Desa dan apa saja yang diperlukan dalam proses pendirian Badan Usaha Milik Desa agar dapat terencana dengan baik. Dan Penetapan tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diinginkan segera tercapai yaitu dapat terciptanya masyarakat yang hidup dengan sejahtera serta dapat meningkatkan perekonomian di desa.

b. Organization atau Pengorganisasian, masih terdapat banyak kendala diantaranya beberapa orang yang ditunjuk oleh pemerintah desa masih enggan bergabung dengan Pemdes untuk membangun BUMDes juga kurangnya minat masyarakat untuk menjadi bagian dari BUMDes karena ketidaktahuan masyarakat terhadap apasaja kegunaan dari Badan Usaha Milik Desa juga menjadi penyebab kurangnya minat masyarakat untuk ikut bersedia membangun dan menghidupi Badan Usaha Milik Desa.

c. Actuating atau Pelaksanaan, cukup baik dengan mengadakan bimbingan, penyuluhan, dan penataan. Usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Tanjung Mekar yaitu dengan membuka pembayaran PBB secara massal di depan kantor BUMDes Tanjung Mekar. Akan tetapi kegiatan tersebut masih belum cukup untuk menarik minat masyarakat. Ada beberapa hal yang di nilai kurang dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tanjung Mekar diantaranya yaitu kurangnya pengenalan terhadap Masyarakat seperti menyebar brosur atau pamflet, mengadakan sosialisasi kepada Masyarakat dalam rangka mengenalkan Masyarakat tentang beberapa fasilitas yang telah di sediakan di Badan Usaha Milik Desa.

d. Controlling atau Pengawasan, kurang berjalan dengan baik karena kinerja pengurus atau pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjung Mekar di Desa Karangtanjung hanya dilakukan satu orang saja, apabila dapat dilakukan secara bersama-sama dan adanya kekompakan satu tim ini maka Badan Usaha Milik Desa akan dapat berjalan dengan maksimal.

# Referensi

- [1] Pendidikan, J., Undiksha, E., Putu, I., Karyada, F., Cita Ayu, P., Gede, I., & Mahayasa, A. (2020). *Disparitas Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. 12(2).
- [2] 2-Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. (n.d.).
- [3] 7. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS. (n.d.).
- [4] Muhammad Dedy Miswar, dan, Studi Manajemen, P., & Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar, S. (2021). Analisis Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tonti Daeng Manggangka Di Desa Palangka, Kabupaten Sinjai. In *Bata Ilyas Journal of Accounting* (Vol. 2, Issue 1).
- [5] MODUL KKN TEMATIK DESA MEMBANGUN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA). (n.d.).
- [6] Sosiawan, A. (2022). *PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI MASA PANDEMI COVID-19 MANAGEMENT OF VILLAGE OWNED BUSINESS ENTITIES (BUM Desa) DURING THE COVID-19 PANDEMIC* (Vol. 4, Issue 1).
- [7] Teori, L., Gambaran, A., & Manajemen, U. (n.d.). *BAB II*.
- [8] Pada, S., Sambimadu, B., Sambibulu, D., Taman, K., Sidoarjo, K., & Maulidiah, N. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata*.
- [9] Manajemen BUMDes Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Hardilina, P., Mardhalena, A., Anwar, H., Sulisdiani, I., Tua Parlindungan Sihalo, N., ProfDrHHadari Nawawi, J., & Ahmad Yani, J. (n.d.). *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <http://journal.sinergicendikia.com/index.php/emp>
- [10] Di, S., Watulaney, D., Kecamatan, A., Timur, L., Minahasa, K., Koso, J., Ogotan, M., & Mambo, R. (n.d.). *MANAJEMEN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA*.
- [11] Filya, A. R. (n.d.). *OPTIMALISASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN PADES DI KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR (STUDI KASUS DI DESA SUKOREJO KECAMATAN BOJONEGORO)*

# Referensi

- [12] Lukmawati, A., Puspaningtyas, A., & Rochim, A. I. (n.d.). STRATEGI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi BUMDes Desa Getas dan BUMDes Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora).
- [13] Sri, A., & Dewi, K. (2014). PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI UPAYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) SEPERTI A MENUMBUHKAN PEREKONOMIAN DESA. In Journal of Rural and Development □ Volume V (Issue 1)
- [14] Nyoman Utama, I. (n.d.). ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA. <http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jebPp.33-39>
- [15] Fitrianita, N., Setiawati, B., & Mone, A. (n.d.). STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA MACCINI BAJI KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- [16] 188520011 - Levis Mariana - Fulltext. (n.d.).
- [17] Sejarah, A., Makmur, B., Berdasarkan, S., Daerah, P., Rokan, K., & Nomor, H. (n.d.). BAB II BADAN USAHA MILIK DESA MAKMUR SEJAHTERA.
- [18] PERATURAN DESA SIDOREJO NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA. (n.d.).
- [19] Lukmawati, A., Puspaningtyas, A., & Rochim, A. I. (n.d.). STRATEGI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi BUMDes Desa Getas dan BUMDes Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora).
- [20] Sururama, R., Ariskha Masdar, A., Pemerintahan, I., Negeri, D., Polewali, P. K., Provinsi, M., & Barat, S. (n.d.). PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BUMDES TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA PADES DESA BATETANGNGA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT.

